



April 2013

Edisi 04/NL/04/2013

Optimalisasi Waduk Dan Sarana Irigasi

Daftar Isi:

	Hal
1. Optimalisasi Waduk Dan Sarana Irigasi	1
2. Bantuan Cetak Sawah Baru Di Sumbawa Dukung Target Produksi Padi Nasional.....	2
3. Penguatan Karantina Bagian Penting Hadapi Tantangan Perdagangan Global.....	4
4. Kementan Siapkan Beberapa Rencana Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015.....	6
5. Bentuk Inovasi Hortikultura Di Gresik Sebagai Prospek Cerah Mangga Jenis Malaba.....	7
6. Kementan Bersama Kemendag Akan Tangani Masalah Impor Satu Atap.....	8
7. Mentan : Penyuluh Pertanian Harus Tetap Membina Petani..	9
8. Kementan Kerjasama Dengan PISAgro Tingkatkan Produktivitas Pertanian.....	10
9. Indonesia Menempati Rangkang Empat Besar Produsen Pertanian Terbesar Dunia.....	11

Masalah pertanian seperti harga komoditas yang turun saat masa panen, kesulitan pemasaran produk, keinginan untuk meningkatkan ketrampilan, masa pola tanam karena perubahan iklim merupakan keluhan sejumlah petani yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan kunjungan kerjanya di Dusun Jeruk Simer, Desa Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang (16/4).

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut menjadi pemikiran pemerintah untuk segera membantu petani mendapatkan kesejahteraannya, untuk itu Presiden meminta kepada seluruh Kementerian dan dinas terkait agar membantu dan mengatasi hal tersebut.



Dalam dialog dengan para petani, presiden mengatakan akan membantu dan mengusahakan bantuan secara bertahap sesuai dengan anggaran negara, dengan begitu semua kebijakan dan program pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan membawa kebaikan bagi rakyat.

Terkait dengan banyaknya petani yang mengajukan usul penambahan peralatan pertanian maupun perikanan.

Presiden menanggapi, jika permintaan itu memang masuk akal dan ada anggarannya pemerintah pasti akan membantu.

"Kita bersyukur baru saja kita melaksanakan panen padi jenis varietas Ciherang/Mekongga, dan kami dapat melihat secara langsung kehidupan petani serta nelayan, padi beras dan perikanan sehingga mengetahui apakah program pemerintah dilaksanakan dengan baik atau tidak, juga dapat mendengar

usul dari masyarakat termasuk yang baru saja disampaikan,” kata Presiden.

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap para petani, Presiden membagikan uang sebesar Rp. 800 juta kepada para petani yang ada di Desa Rawa Gempol Wetan, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. “Ini merupakan bantuan khusus dari saya, sebagai modal awal bagi saudara-saudara untuk lebih berkembang lagi,” kata Presiden.

Ada sekitar 7 kelompok tani dan 1 kelompok ternak itik yang mendapat bantuan dana dari Presiden. Kelompok tani tersebut adalah Kelompok Tani Sri Asih, Sri Glonggong, Sri Kendal, Kepuh, Sri Mulya, Sri Mukti, Sri Makmur, dan Kelompok Ternak Itik, masing-masing sebesar Rp 100 juta.

Kepada masyarakat petani di Dusun Jeruk Simer, Desa Rawa Gempol Wetan Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang Presiden meminta agar mengoptimalkan waduk dan sarana irigasi serta dapat terus memelihara sarana pertanian. “Sarana pertanian harus terus dipelihara sehingga upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dapat tercapai,” kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden meminta kepada Bupati Karawang, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertanian untuk meninjau langsung sarana irigasi sekaligus menginventarisir permasalahan yang ada dan segera melaporkannya.

Menanggapi arahan Presiden terkait pemeliharaan irigasi, Menteri Pertanian Suswono menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 6 triliun untuk memperbaiki irigasi yang rusak ringan ataupun berat, sehingga dapat mendongkrak penghasilan padi. “Hambatan mengenai program nasional Surplus beras 10 juta ton pada 2014 adalah irigasi dan alih fungsi lahan” ujar Mentan.

Tetapi dengan dilaksanakannya panen raya di Karawang, Jawa Barat, Menteri Pertanian,



menyatakan dirinya merasa optimis petani dapat mencapai program nasional surplus beras 10 juta ton pada 2014. “Potensi masih ada, saya optimis tahun depan petani kita akan menggapai program nasional dengan surplus beras 10 juta ton, pada tahun 2012 surplus padi sudah hampir mencapai 6 juta ton, target tahun ini semoga surplus lebih meningkat dari tahun lalu,” kata Mentan.

Lebih lanjut dikatakan Mentan, alih fungsi lahan pertanian menjadi hambatan dalam program nasional surplus beras pada 2014. “Alih fungsi seperti di Karawang tekanannya luar biasa, sehingga diharapkan peranan dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempertahankan lahan - lahan produksi seperti ini agar tetap dijaga. Jika hendak membangun sektor non pertanian, carilah tanah yang tidak subur,” tegas Mentan.

Petani juga diharapkan dapat memanfaatkan lahan-lahan dengan optimal, yang terpenting dilapangan petani dapat menerapkan dan memaksimalkan teknologi yang ada. “Jika teknologi diterapkan dengan benar, petani bisa menghasilkan antara 9 hingga 10 ton per hektar (ha). Jika penerapan ini dilakukan dengan baik maka lahan yang ada akan memberikan potensi peningkatan produksi yang lebih besar,” tutur Mentan.

Bantuan Cetak Sawah Baru Di Sumbawa Dukung Target Produksi Padi Nasional

Menteri Pertanian yang didampingi Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bersama Bupati Sumbawa dan sejumlah pejabat daerah Sumbawa melakukan panen padi perdana hasil program bantuan percontaan sawah baru seluas 80 hektar di Desa Muer Kecamatan Plampang.

“Biasanya sawah baru, dapat mencapai hasil yang maksimal setelah sembilan kali panen, dan selama ini, sawah baru rata-rata produksinya di bawah empat ton per hektar tetapi di Sumbawa bisa mencapai enam ton per hektar,” demikian dikatakan Menteri Pertanian Suswono saat melakukan panen raya di lahan sawah baru di

Dusun Jompong, Desa Muer, Kecamatan Plampang, Sumbawa, NTB (6/4).

Atas prestasi tersebut, Mentan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap hasil produksi cetak sawah baru tersebut yang rata-rata mencapai 6 ton per hektare. Dengan rata-rata produksi sebesar itu, Mentan berkeyakinan target produksi padi NTB dapat terlampaui.

"Target produksi padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2013 sebesar 72,06 juta ton gabah kering giling (GKG) diperkirakan terlampaui setelah realisasi produksi sawah baru di Sumbawa yang rata-rata mencapai enam ton per hektar. Kabupaten Sumbawa ditargetkan memberi kontribusi 435 ribu ton terhadap produksi padi NTB pada 2013. Secara nasional pun dengan rata-rata produksi sebesar itu, insya Allah target produksi sebesar 72,06 juta ton akan terlampaui," tandas Mentan.

Terkait target produksi padi, Pemerintah Provinsi NTB telah berkomitmen untuk menyumbang sebesar 2,2 juta ton GKG, di mana sebanyak 435 ribu ton di antaranya merupakan kontribusi Kabupaten Sumbawa. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan sebesar Rp.33 miliar guna mencetak sawah baru seluas 3.300 hektare (ha) di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Setiap satu hektare sawah baru yang akan dicetak mendapat sumbangan Rp 10 juta. Pemberian bantuan ini merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi nasional pada tahun 2013 sebesar 72,06 juta ton gabah kering giling (GKG)," kata Menteri Pertanian.

Saat ini setiap tahunnya terjadi alih fungsi lahan per tahun sekitar 100.000 hektar maka Pemerintah akan terus menambah luas cetak sawah baru. Pada tahun 2013 Sumbawa mendapat 3.300 hektar percontakan sawah baru, penambahan akan terus dilakukan, tetapi dengan cara memanfaatkan lahan yang biasa panen sekali menjadi dua kali. Syarat utamanya harus ada sumber air.

Mentan mengharapkan bantuan yang diberikan pemerintah ini benar-benar digunakan untuk mencetak sawah baru. "Saya tahu petani itu jujur-jujur, sehingga saya yakin bantuan ini benar-benar untuk mencetak sawah baru," kata Mentan.

Kepada petani, Mentan menganjurkan apa yang telah dicontohkan agar bisa diterapkan, bukan hanya sekedar contoh saja tanpa diterapkan.

Newsletter April 2013



Misalnya pola tanam jajar legowo dan pemupukan dengan NPK hasilnya akan jauh lebih baik. Kepada para penyuluh, Mentan menghimbau agar dapat memberikan penyuluhan dengan aktif dan sungguh-sungguh.

Lebih lanjut Mentan mengemukakan bahwa panen cetak sawah baru yang selama 2 tahun telah ditanami, sudah menghasilkan panen di atas 4 ton per hektar. Hal tersebut jarang sekali tetapi di Sumbawa ternyata sudah mencapai 6 ton per hektar. Namun Mentan menyayangkan masih banyaknya lahan yang terlantar. Diperkirakan karena faktor SDM yang masih kurang. Padahal matahari bersinar setiap hari untuk tanam menanam. Seharusnya, lokasi yang masih belum dimanfaatkan bisa ditanami.

Mentan merasa prihatin dengan banyaknya lahan terlantar. Padahal jika para petani bisa diberi akses untuk mengelola lahan-lahan tersebut tentunya dapat meningkatkan produksi pangan nasional, dan pada gilirannya mensejahterakan petani juga. Sebab persoalan yang dihadapi petani Indonesia adalah sempitnya lahan yang dikelola, yang rata-rata hanya 0,3 hektare per orang. Dengan lahan hanya seluas itu kemampuan produksi petani pun menjadi terbatas. "Lahan itu hanya untuk dikelola, bukan dimiliki," jelas Mentan.

Mentan juga meminta Pemerintah Daerah melindungi dan menjaga lahan pertanian produktif. Menurut Mentan hal tersebut untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia, dari sisi pangan. Pada saatnya nanti, setiap negara akan mementingkan negaranya sendiri untuk urusan stok pangan. Hanya sedikit saja yang dilempar ke pasar internasional.

Jika lahan pertanian terus menyusut akibat konversi lahan, maka ke depan Indonesia akan kekurangan stok pangan, dan akan bergantung pada negara lain. "Karena itu saya selalu berpesan kepada para Bupati agar lahan-lahan pertanian yang ada dijaga. Kalau perlu ditambah dengan mencetak sawah-sawah baru," jelas Mentan.

"Kementan RI, memiliki tugas yang sangat berat karena menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia. Tetapi sebetulnya tanggung jawab tersebut tidak hanya di Kementan RI. Karena kontribusi Kementan hanya sekitar 20 persen. Selebihnya tergantung dari sektor lainnya, meliputi, persoalan air, lahan, perdagangan distribusi, industri, termasuk keuangan. Kalau keuangan turunnya terlambat, maka musim tanam akan lewat. Berarti menyia-nyiakan waktu. Tanam menanam mestinya tidak harus menyesuaikan kapan anggaran turun. Ini persoalan yang kadang-kadang masih saja terjadi," ujar Mentan.

Kementan memiliki target tercapainya swasembada pangan. Ada 5 komoditas yang sering disampaikan, beras, jagung, kedelai, gula dan daging sapi.

Bahkan untuk beras, Presiden telah mencanangkan bahwa tahun 2014 surplus 10 juta ton. Ini dianggap wajar karena kebutuhan bulanan sekitar 3 juta ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Jadi kalau ada 10 juta ton paling tidak ada satu musim tanam akan aman. "Walaupun produktifitas panen kita hampir 40 juta ton, surplus kita hanya 5,6 juta ton di tahun 2012. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi kita," ujar Mentan.

"Kita punya target tahun 2013 yang luar biasa, yaitu pencapaian 72 juta ton gabah kering giling.

Tanggung jawab kita untuk surplus di 2014. Berarti meningkat sekitar 4 persen. asal bekerja dengan sungguh-sungguh, hal itu dapat tercapai" jelas Mentan.

Supaya surplus tersebut tercapai, maka Kementan akan menyempurnakan manajemen antara pusat dan daerah. Pada dasarnya tanggung jawab pangan di daerah adalah Bupati. Sehingga Bupati harus bisa memastikan bahwa tidak ada masyarakatnya yang meninggal dunia karena kelaparan.

Mentan juga mengemukakan, kadang-kadang Indonesia dibandingkan dengan Thailand yang bisa ekspor dengan luas lahan panennya 90 juta hektar. Indonesia hanya 13, 5 hektar kalau pun maksimal 14 juta hektar atau 1,5 kali dengan Thailand. Tapi dengan luasan 13,5 hektar hasilnya 14 juta ton. Sementara Thailand hasilnya sekitar 20 sampai 22 juta ton. Jadi koefisien Indonesia masih berada di atas Thailand. Padahal penduduk Indonesia hampir 4 kali Thailand, namun makan nasinya juga lebih banyak dari Thailand.

Terkait upaya Pemerintah RI untuk meningkatkan diversifikasi pangan. maka masyarakat Sumbawa diharapkan jangan hanya selalu makan nasi. Ada jagung yang harus dibiasakan untuk anak-anak. Mulailah dengan makanan selingan. Bahkan Bupati diminta untuk makan singkong di rumahnya agar diikuti masyarakat.

Penguatan Karantina Bagian Penting Hadapi Tantangan Perdagangan Global

Karantina pertanian sebagai benteng terdepan pertanian Indonesia harus terus diperkuat sarana dan prasarannya. Kemampuan dalam mendeteksi penyakit hewan dan tumbuhan pun harus di tingkatkan terus menerus. "Kita tentu tidak ingin masalah sulitnya produk pertanian kita menembus pasar dunia diperparah dengan menurunnya produksi di tingkat petani akibat ketidakmampuan kita mendeteksi penyakit tanaman," demikian yang dikatakan Menteri Pertanian, Suswono saat menghadiri peresmian Balai Karantina Pertanian Kelas II di Yogyakarta, (5/4).

Balai Karantina Pertanian kelas II Yogyakarta, yang diresmikan oleh Mentan RI berada di Jalan Solo Kilometer 8 Maguwoharjo Depok Sleman akan menjadi ujung tombak pengawasan produk pangan pertanian dalam menyambut era pasar bebas, untuk mengontrol masuknya produk pertanian dan hewan dari luar negeri ataupun produk yang akan diekspor keluar negeri.

Menteri Pertanian mengatakan bahwa dengan diresmikannya Balai Karantina Pertanian tersebut bisa memberikan dukungan bagi pembangunan nasional, khususnya pembangunan pertanian di bidang sektor perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati. "Oleh karena itu keberadaan karantina pertanian dan instalasinya harus didukung sekaligus perlu dilakukan inovasi-inovasi untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, jika bisa dipermudah, jangan dipersulit. *In line inspection* yang telah dilakukan harus terus ditingkatkan pelaksanaannya, agar mempermudah dan memperpendek bisnis proses pengiriman produk pertanian kita," imbuh Mentan.

Mentan mengungkapkan, penguatan karantina menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan perdagangan global yang semakin meningkat, serta tingginya tekanan untuk menerima produk pertanian dari luar. "Dalam era



perdagangan bebas, upaya penerapan tarif tidak dapat lagi menjadi alat untuk menahan serbuan produk impor,” jelas Mentan.

Aspek teknis berbasis data ilmiah dan pengetahuan di bidang Sanitary dan Phytosaitary (SPS) atau kebersihan dan kesehatan pangan, dapat membantu menghadapi tekanan tersebut. Dalam hal pengeluaran dan pemasukan produk pertanian, persyaratan SPS dijadikan alat untuk menghambat arus masuk suatu komoditas pertanian dalam persaingan antarnegara mitra dagang.

“Untuk memasukkan buah manggis ke Australia, kita membutuhkan waktu selama enam tahun karena mereka menuntut faktor keamanan pangan yang akan dikirim. Kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk memproteksi produk pertanian dari luar negeri masuk ke Indonesia di era pasar bebas ini,” kata Mentan.

Menteri Pertanian menegaskan faktor keamanan pangan dalam negeri dapat menjadi strategi pemerintah untuk mencegah membanjirnya impor produk pertanian dan hortikultura. “Dengan alasan faktor keamanan pangan dalam negeri, sebenarnya kita bisa membatasi impor produk pangan,” kata Mentan.

“Pertumbuhan produksi buah lokal semakin meningkat dari tahun ke tahun, pada 2011 peningkatan produksi buah lokal mencapai 18,23 persen dengan total volume lebih dari 18 juta ton,” kata Mentan.

Melimpahnya buah lokal harus diimbangi peningkatan konsumsi buah lokal oleh masyarakat Indonesia. Peningkatan kegembiraan mengkonsumsi buah lokal dan pengawasan produk buah-buahan yang masuk ke Indonesia akan dapat mengurangi membanjirnya buah impor.

“Satu-satunya instrumen agar memproteksi produk dalam negeri atas membanjirnya produk impor ke Indonesia adalah dengan menyakinkan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak layak dengan alasan keamanan pangan,” kata Mentan.

Menyangkut peningkatan produksi buah lokal, Menteri Pertanian menerangkan bahwa secara nasional, produksi buah lokal sekarang ini terus mengalami peningkatan seperti mangga yang pertumbuhannya mencapai 4,6 %, pisang meningkat sebesar 3,61 %, dan durian meningkat menjadi 20,41 %. Dengan meningkatnya produk-produk lokal seharusnya

konsumen dalam negeri juga mencintai buah-buah lokal, karena di pasar dalam negeri, posisi buah impor tersebut sebenarnya besarnya kurang dari 10 % dibandingkan dari produksi nasional.

“Pasokan buah lokal sebenarnya sangat banyak dan memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, sedangkan impor buah lokal di Indonesia tidak lebih dari 10 persen produksi buah di Indonesia. Mengingat meningkatnya produk-produk lokal ini diharapkan konsumen dalam negeri juga mencintai buah-buah lokal kita sendiri,” ujar Mentan.



Menteri Pertanian juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan terbangunnya kerjasama yang baik dengan Badan Karantina Pertanian dalam rangka mendorong peningkatan ekspor buah dan sayuran segar yang berasal dari DIY sebagai kontribusi nyata peningkatan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Sesuai dengan visi dan misi pembangunan pertanian 2010-2014, Kementan akan terus konsisten mendorong akselerasi ekspor produk pertanian melalui peningkatan daya saing dan nilai tambah agar petani dapat menikmatinya. dan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi nasional, yang diharapkan mencapai 4 persen per tahun, Kementan fokus pada pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor.

Dari program yang akan dikerjakan, Kementerian Pertanian sedang berupaya untuk mengakselerasi perdagangan buah dan sayuran segar. Di Yogyakarta (DIY) diharapkan menjadi salah satu wilayah yang dapat ikut mendorong pertumbuhan ekspor buah dengan keberadaan fasilitas Balai Karantina Pertanian yang baru diresmikan.

Jajaran kementerian pertanian sedang bekerja keras dalam rangka meningkatkan akselerasi ekspor-import pertanian diberbagai mitra dagang. Neraca perdagangan internasional produk hortikultura Indonesia hingga kini terbilang defisit.

Surplus perdagangan produk pertanian yang dialami Indonesia masih tergantung dari produk komoditas unggulan perkebunan. Produk-produk perkebunan yang menjadi unggulan Indonesia saat ini di perdagangan produk pertanian

internasional adalah CPO yang tercatat menjadi nomor satu di dunia dan karet di nomor dua.

"Kalau berbicara komoditas hortikultura, kita memang masih defisit, namun karena kita dapat dukungan dari sektor perkebunan seperti produk CPO yang nomor 1 di dunia, produk karet nomor 2 dan yang juga cukup signifikan adalah produk kakao maka sebenarnya nilai neraca perdagangan kita surplus. Tahun lalu diperkirakan kurang lebih US\$ 22 milyar," kata Menteri Pertanian.

Kementan Siapkan Beberapa Rencana Menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015

Dengan alasan keamanan pangan dalam negeri dapat menjadi strategi Pemerintah untuk mencegah membanjirnya impor produk pertanian dan hortikultura. Banyaknya produk impor pertanian masih dianggap merugikan para petani yang memiliki produk pangan dari sumber daya lokal. Produksi impor yang masuk ke Indonesia seperti serbuan kedelai pada 2012 dinilai telah menghabiskan dana atau devisa. Situasi itu, berimplikasi mematikan produksi lokal petani serta tidak meningkatkan kesejahteraan pengrajin tempe, dan justru sebaliknya, mematikan beberapa pengrajin tempe, tahu sehingga juga berdampak pada berkurangnya pekerjaan di bidang tersebut.

"Tantangan perdagangan dunia yang meningkat, termasuk masuknya berbagai jenis produk impor, tidak bisa dihadapi sendiri oleh Kementerian Pertanian, tetapi harus dihadapi secara bersama-sama. Satu-satunya instrumen agar memproteksi produk dalam negeri atas membanjirnya produk impor ke Indonesia adalah dengan meyakinkan bahwa atas pertimbangan keamanan pangan lokal, produk yang di impor harus lulus uji kelayakan masuk ke Indonesia.

Dengan alasan keamanan pangan dalam negeri juga, sebenarnya kita bisa membatasi impor produk pangan" demikian dikatakan Menteri Pertanian, Suswono saat menghadiri penutupan Agrinex Expo 2013 di Hall B Jakarta Convention Center (7/4).

Lebih lanjut Menteri Pertanian mengatakan bahwa waktu persiapan menghadapi pasar bebas pangan ASEAN semakin dekat. Jika tidak dibarengi dengan kesiapan maka berpotensi memicu kekhawatiran pelaku pertanian di dalam negeri. Pasar tunggal ASEAN berlaku mulai Desember 2015, berarti sekitar 20 bulan ke depan. Jika tidak siap, justru pasar tunggal bisa merugikan produksi pertanian lokal.

"Berlakunya pasar tunggal ASEAN atau pasar bebas tanpa tarif itu merupakan tantangan, bagaimana kita menyiapkan agar kita bisa bersaing. Jika tidak maka seperti sekarang komoditas pangan kita jatuh karena liberalisasi. Contohnya kedelai tahun 1980-an kita ekspor, tetapi dengan masuknya IMF justru kita terpuruk dan sekarang malah impor. Karena kedelai impor harganya lebih murah," ungkap Mentan.



Menurut Mentan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa rencana menghadapi pasar tunggal Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang akan resmi diberlakukan pada Desember 2015. Salah satu rencana Kementerian Pertanian adalah dengan melakukan ekstensifikasi lahan pertanian.

Mentan sedang memperjuangkan rencana ekstensifikasi lahan dan Kementerian Pertanian harus segera bertindak untuk menghadapi pasar tunggal ASEAN." "Ekstensifikasi lahan tidak bisa dihindari dan memang harus segera dilakukan," jelas Mentan.

Untuk memperkuat rencananya tersebut, Mentan mencontohkan Thailand, negara tersebut mampu mengeksport hasil-hasil pertanian negara mereka meskipun luas lahan pertanian mereka masih dibawah luas lahan pertanian Indonesia yang sekitar 13,5 juta hektare. "Dibanding Thailand, lahan kita justru lebih luas 1,5 kali lahan mereka. Namun, penduduk kita itu berkali-kali lipat dari penduduk Thailand," ungkap Mentan.

Selain ekstensifikasi lahan, Menteri Pertanian juga akan semakin meningkatkan kerjasama dengan beberapa Universitas di Indonesia yang memang konsisten di bidang penelitian pertanian dan hortikultura.

Kementerian Pertanian juga sudah menyiapkan komoditas unggulan untuk bisa bersaing di pasar bebas. Beberapa komoditas hortikultura khas produk tropis, seperti mangga dan manggis, bisa menjadi primadona pasar.

Saat sekarang sektor hortikultura masih di bawah bayang-bayang Singapura. untuk itu, ke depan, pemerintah akan menyiapkan sektor hortikultura, salah satunya dengan cara mendorong pengelolaan horti skala estate. Dengan pengelolaan skala luas diharapkan pelaku horti mampu bersaing. Saat ini, secara umum, rata-rata petani modal kepemilikan lahannya hanya 0,25 hektare atau jauh dari ideal versi IPB sebesar 2 hektare.

Bentuk Inovasi Hortikultura Di Gresik Sebagai Prospek Cerah Mangga Jenis Malaba

Menteri Pertanian bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi didampingi Gubernur Jawa Timur dan Bupati Gresik melakukan pencaanangan program Kemitraan Inti Plasma Hortikultura dalam Kawasan Bisnis Berbasis Inovasi di Desa Sukodono, Gresik Utara. Kawasan Industri Berbasis Inovasi tersebut akan dikembangkan menjadi kawasan kebun mangga.

"Kawasan Timur Tengah, Hongkong, dan negara lain masih terbuka untuk pasar mangga. Ini peluang pasar yang terbuka, sehingga inovasi hortikultura di Gresik Utara bisa maju pesat," kata Menteri Pertanian Suswono, dalam peletakan batu pertama Pencaanangan Kemitraan Inti Plasma Hortikultura di Kawasan Industri Berbasis Inovasi di Gresik Utara, (1/4).

"Rencananya, di Kawasan seluas 2.000 hektare tersebut akan ditanami mangga jenis Malaba. Diharapkan, mangga yang dihasilkan di kawasan itu dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri hingga pasar ekspor di luar negeri. Inisiatif ini yang ditunggu-tunggu, karena dapat memberdayakan petani," kata Mentan.

Optimisme Mentan terhadap Kawasan Bisnis Khusus Hortikultura tersebut terkait dengan potensi Indonesia sebagai daerah tropis yang

lahannya sangat bagus untuk ditanami komoditas mangga. Apalagi, selama ini mangga Indonesia sangat diminati pasar ekspor seperti Timur tengah, China, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga Eropa. "Jadi peluangnya sangat besar," tukas Mentan.

Untuk itu, ke depan Mentan meminta agar mangga yang dikembangkan disesuaikan dengan minat pasar. "Di luar negeri, mangga yang digemari adalah yang warnanya menarik seperti jingga dan kuning. Mangga jenis inilah yang harus dikembangkan. Jadi yang harus diperhatikan betul adalah rasa mangga yang enak, menarik dan bisa tumbuh sepanjang tahun. Karena kita ketahui antara April – Agustus, mangga tidak berbuah," jelas

Mentan.

Pada kesempatan tersebut Mentan memberikan apresiasi terhadap program Kemitraan Inti Plasma Hortikultura dalam Kawasan Bisnis Berbasis Inovasi di Desa Sukodono, Gresik Utara. "Saya sangat mengapresiasi upaya pengadaan Kawasan Bisnis Khusus Hortikultura. Program ini bisa menjadi jawaban atas persoalan yang selalu dihadapi pemerintah terkait dengan persoalan importasi produk hortikultura," kata Mentan.

Menurut Mentan, selama ini pemerintah terus mendorong petani lokal untuk menanam



komoditas hortikultura tanpa merusak alam. Program tersebut sejalan dengan apa yang digalakkan pemerintah. "Ini nantinya bisa menjadi jawaban atas persoalan yang selalu dihadapi pemerintah terkait dengan persoalan importasi produk hortikultura," kata Mentan.

Namun demikian Mentan mengimbau kepada pengelola kawasan untuk tidak melakukan konversi lahan pertanian padi menjadi kebun mangga. Karena hal itu akan mempengaruhi produksi padi daerah maupun nasional.

Mentan juga meminta agar dalam pengembangan produk pertanian tidak berpikir hanya untuk kepentingan satu kedaerahan tertentu saja, tetapi harus berpikir mengutamakan kepentingan nasional.

Dalam rangka pemberdayaan petani, Mentan meminta kepada pemerintah daerah untuk memberi akses kepada petani agar dapat mengelola lahan-lahan telantar yang tidak produktif. Lahan tersebut bukan untuk dimiliki. Tetapi hanya untuk dikelola, ditanami dengan berbagai produk pertanian.

Jika hal ini dapat direalisasi salah persoalan petani Indonesia, yakni keterbatasan lahan bisa teratasi. Saat sekarang, petani di Indonesia rata-rata hanya memiliki 0,25 hektare lahan. Akibatnya produk petani Indonesia sulit bersaing dengan petani asing yang lahannya ratusan hektare

Terkait seringnya mengalami kendala kekurangan stok bahan baku kebutuhan dapur rumah tangga Menteri Pertanian akan terus memperbaiki kinerjanya. "Sekarang sedang kita evaluasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), untuk kita perbaiki prosedur perijinan dan sebagainya. Permentan mana yang menghambat proses impor," kata Mentan.

Untuk menanggulangi kelangkaan pangan dan produk hortikultura, Menteri Pertanian akan mendorong petani dalam negeri untuk lebih meningkatkan produksi dan daya saing global. "Kami akan lebih mendorong produksi dalam negeri, agar terus meningkat, sebab volume, nilai produksi hortikultura naik terus. Walaupun sekarang ini produk unggulan masih di perkebunan," imbuh Mentan.

Kementan Bersama Kemendag Akan Tangani Masalah Impor Satu Atap

Adanya kasus Bawang Putih impor yang sempat menumpuk di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS) Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, membuat Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera mengimplementasikan proses perizinan satu atap terkait dengan proses birokrasi untuk mendapatkan dokumen impor. Rencananya Kementan bersama Kemendag akan menerapkan pelayanan satu atap sistem perizinan impor hortikultura dengan sistem online. "Kami, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sudah sepakat untuk memberikan pelayanan satu atap dan online untuk perizinan impor hortikultura. Sehingga importir bisa mengajukan izin impor sewaktu-waktu, dan tidak ada lagi produk hortikultura impor yang masih tertahan" kata Mentan Suswono disela kunjungannya ke Terminal Peti Kemas di Surabaya, (1/4).

Menurut Mentan, pihaknya akan melakukan perubahan dalam sistem perizinan impor produk hortikultura untuk pengajuan sebagai perusahaan importer mulai semester kedua tahun 2013. Dengan sistem perizinan satu atap dan sistem online bersama Kementerian Perdagangan, diharapkan mempercepat perizinan impor hortikultura. Selain itu, sistem

online satu atap ini bisa mencegah terjadinya penumpukan barang.

Nantinya setiap importir yang akan mengimpor 20 jenis komoditas hortikultura cukup mengantongi satu surat keputusan dari instansi yang ditunjuk. Sehingga satu komoditas hortikultura wajib mendapat satu surat keputusan yang dikeluarkan lintas instansi seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Mentan menegaskan dirinya akan mengakomodasi langkah-langkah untuk

penyederhanaan dokumen importasi produk hortikultura. Mentan memastikan lembaga satu atap berisi lintas instansi seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kemendag, Kementan, Bea Cukai, dan Karantina.

Mentan menuturkan kebijakan tersebut dimulai dengan revisi Permentan 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Selain itu Mentan juga mendorong Kementerian Perdagangan agar segera melakukan revisi atas Permendag No. 60 Tahun 2012. Nantinya, implementasi perizinan satu atap tidak lagi menggunakan kuota, tapi skema biaya masuk pada produk hortikultura impor. Prinsipnya, pemerintah ingin menjalankan amanat UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Kebijakan tersebut juga mengantisipasi semester II 2013, di mana ada 170 importir yang mengajukan izin impor. Namun, Mentan yakin kebijakan satu atap akan efektif mencegah importir nakal. "Prinsipnya untuk melindungi petani, konsumen dan mempercepat pelayanan," ujar Mentan.

Mentan berharap importir produk hortikultura tidak lagi melakukan kecurangan. Selain itu, Mentan melihat proses mendapatkan status importir terdaftar (IT) dari Kemendag, importir produsen dari Kementerian Perindustrian dan

Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dari Kementan dianggap memperpanjang

"Pada semester pertama tahun ini sudah ada 131 importir terdaftar. Jumlah ini bertambah pada semester kedua menjadi 170 importir. Regulasi yang baru nantinya akan memperketat jumlah importir. Bila selama ini satu importir memiliki lebih dari dua, ke depan kita perketat, dari satu importir memiliki satu keputusan," jelas Mentan.

Keputusan yang dimaksud Mentan adalah laporan yang disampaikan importir terkait ijin impor. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan tidak ada lagi produk hortikultura impor yang masih tertahan, seperti yang saat ini ada di TPS.

Mentan mencontohkan, dari 332 kontainer bawang putih impor yang sebelumnya tertahan di pelabuhan Tanjung Perak karena belum dilengkapi surat Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dan Surat Persetujuan Impor (SPI) berasal dari 11 importir, masih tersisa 65 kontainer, artinya 267 kontainer bawang putih impor telah dilepas ke pasar domestik. Para importir tersebut bila sudah mengantongi dokumen Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) akan terancam dblacklist jika tidak segera mengeluarkan barangnya dari pelabuhan. "Pasti ada sanksi, dan nanti kita koordinasi dengan Bea Cukai, karena kewenangan ada di Bea Cukai," tegas Mentan.

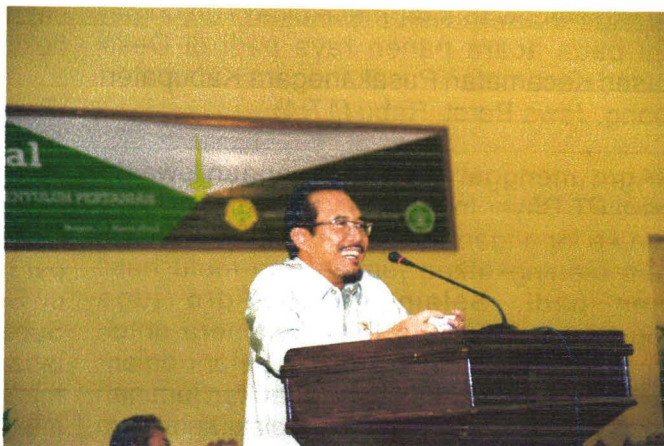
Mentan : Penyuluh Pertanian Harus Tetap Membina Petani

"Sejak era otonomi banyak penyuluh melakukan alih profesi dan alih fungsi sehingga para penyuluh tidak lagi fokus dalam memberikan pembinaan kepada para petani. Dalam pembangunan pertanian, profesi sebagai Penyuluh Pertanian adalah profesi yang sangat penting sehingga harus bekerja dengan profesi yang ada" kata Menteri Pertanian, Suswono saat menjadi pembicara utama dalam seminar nasional di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Jawa Barat, (11/4).

Lebih lanjut Mentan mengatakan bahwa yang sangat memprihatinkan adalah karena banyak penyuluh yang justru tidak peduli dengan petani. Padahal dalam waktu dekat tepatnya pada akhir 2015, Indonesia akan menghadapi liberalisasi ekonomi dengan diberlakukannya pasar tunggal Asean. Perdagangan bebas menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang mau tidak mau harus

dihadapi Sementara itu, para petani membutuhkan para penyuluh sebagai pembina yang akan mendukung kemajuan sektor pertanian.

"Petani kita harus berhadapan dengan petani raksasa, jelas ini tidak seimbang dan terasa berat



bagi petani kita dan kita harus akui, petani Indonesia masih tergolong petani miskin. Miskin secara struktural karena lahan yang semakin sedikit, tercatat lahan pertanian Indonesia hanya 0,2 hingga 0,3 hektar. Kondisi ini harus menjadi kajian bersama bagaimana penyuluh berperan aktif menyukseskan para petani. Penyuluh harus memiliki andil bagaimana lahan yang sempit bisa produktif.” ujar Mentan.

Mentan menambahkan, tantangan pertanian kedepan sangat berat sehingga perlu peran aktif penyuluh dalam menyiapkan mental petani Indonesia yang sedang dihadapi berbagai persoalan di lapangan. Dengan begitu peran penyuluh sangat penting dalam sentral pertanian dan pengembangannya.

Mentan juga mengingatkan agar penyuluh bekerja secara ikhlas dan profesional, tetap bersemangat bekerja memberikan pangan kepada bangsa. “Bekerja secara ikhlas, pemerintah pasti akan memperhatikan, Selama jadi penyuluh jalankanlah kepentingan petani dan hindari kepentingan politik” tutur Mentan.

Mentan menyatakan dirinya menyambut baik pengembangan dan penguatan penyuluh secara berkelanjutan. Kementerian Pertanian juga mendorong profesi penyuluh, mendukung profesionalisme dan etika profesi dengan mengedepankan penguatan lembaga menjadi lebih baik. “Bagaimana wajah penyuluhan pertanian ke depannya, ini harus menjadi kajian serius,” kata Mentan

Kementan Kerjasama Dengan PiSAgro Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah agar dapat mewujudkan peningkatan produksi padi untuk mengatasi masalah ketahanan pangan. Dalam menjamin keberhasilan program peningkatan produksi padi, Kementan bekerjasama dengan *Partnership for Indonesia Sustainable Agriculture (PiSAgro)*. PiSAgro merupakan kemitraan bagi pertanian berkelanjutan Indonesia atau kemitraan publik dan swasta bertujuan membantu pemerintah dalam mengatasi ketahanan pangan nasional. Caranya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian strategis secara lestari dan meningkatkan penghidupan petani kecil.

“Tujuan PiSAgro adalah mencapai target 20% dalam meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Selain itu, meningkatkan 20% pendapatan petani Indonesia, dan menurunkan 20% emisi gas rumah kaca ini merupakan prototipe nasional, jika hasilnya memuaskan” hal terbut dikatakan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan saat melakukan kunjungan kerja pada acara panen raya padi di Desa Kotasari Kecamatan Pusakanegara Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (17/4).

PiSAgro menggandeng perusahaan swasta seperti PT Bayer Indonesia yang berkomitmen terjun ke lapangan untuk mendampingi petani dalam meningkatkan jumlah dan mutu hasil panen padi. Selain itu PiSAgro juga menggandeng PT Tiga Pilar Sejahtera untuk memberi pembelajaran kepada petani dalam aspek pasca panen serta memberikan jaminan pembelian produk berkualitas. Melalui kemitraan



PiSAgro, petani di desa Kotasari dan Blanakan, Kabupaten Subang, petani mendapat bantuan pendampingan teknologi dari PT Bayer Indonesia dan juga dengan PPL kecamatan Pusakanegara.

Dipilihnya wilayah Subang karena pemerintah menjadikan daerah ini sebagai daerah lumbung padi nasional, dan saat ini produktifitasnya sekitar 6,4 ton per hektar hingga 9 ton per hektare.

“Panen padi di Subang saat sekarang mencapai 10,2 ton gabah kering per hektar (ha), lebih banyak 1,1 ton per ha atau 12,1% di atas rata-rata produktivitas padi di Kotasari, yang pada musim panen sekarang hanya mencapai 9,1 ton per ha. Dengan meningkatnya panen raya padi di Subang, diharapkan lahan pertanian di Subang dipertahankan dari gangguan alih fungsi lahan dan petani dapat terus menjaga dan meningkatkan kualitas produktivitas panen padi,” jelas Wamentan.

Indonesia Menempati Rangking Empat Besar Produsen Pertanian Terbesar Dunia

Teknologi hasil pertanian menjadi kata kunci yang mengkaitkan pada hilirisasi hasil pertanian dalam peningkatan nilai tambah. Teknologi itu harus mendorong muatan agribisnis yang terintegrasi dan bermuara pada penetrasi pasar, hal itu dikatakan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan pada acara Gelar Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (24/4).

Indonesia Menempati rangking empat besar produsen pertanian terbesar dunia, tetapi besarnya produksi pertanian belum dibarengi dengan optimalisasi peningkatan kualitas produk. Peranan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian memberikan kontribusi antara 13-14 persen. Industri jasa dan jasa agribisnis memberi kontribusi 45 persen dari nilai tambah.



Lebih lanjut dikatakan Wamentan, ada 75 persen tenaga kerja yang sebagian besar di pedesaan menggantungkan hidupnya di sektor agribisnis pertanian, akan tetapi karena minimnya kapasitas sumber daya petani dalam mata rantai agribisnis mengakibatkan rendahnya



kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan. Minimnya kapasitas sumber daya petani dalam mata rantai agribisnis mengakibatkan rendahnya kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan. Hanya 60 persen hasil panen produk hortikultura yang dimanfaatkan petani dan sisanya 40 persen hasil panen pertanian dibiarkan terbuang percuma karena harganya jatuh. Selain itu juga, tingginya susut panen padi berkisar 10-15 persen. Hal tersebut mengakibatkan petani tidak memperoleh nilai tambah dari hasil produk yang dihasilkan.

Kegiatan pameran yang bertemakan "Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Hasil Pertanian Melalui Penggunaan Teknologi Tepat Guna" memamerkan hasil-hasil pertanian dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa teknologi pengolahan hasil masih ada atau masih eksis.

Teknologi pengolahan hasil pertanian dipandang terus berkembang dengan berbagai peluang dan tantangannya sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui gelar teknologi pengolahan hasil pertanian. Ada lima aspek yang harus dikondisikan agar teknologi pengolahan hasil pertanian menjadi tujuan bersama yaitu : sebagai Penggerak hilirisasi; Penguatan agribisnis; Integrasi hulu-hilir; Dukungan bagi pengembangan bioenergi dan mendorong diversifikasi pangan.

Ditambahkan Wamentan, teknologi pengolahan hasil harus menjadi pilar dalam upaya diversifikasi pangan. Tanpa teknologi, pengolahan hasil diversifikasi pangan nyaris mustahil dilakukan karena diversifikasi pangan tidak akan berjalan baik bila tidak didukung oleh pengolahan hasil pertanian.



BIRO UMUM DAN HUMAS
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM, No. 3 Jakarta Selatan
Telp./Fax (021) 780 4457 (ext.2316)